

**OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL OLEH DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SELATAN  
PROVINSI ACEH**

M.Asyraf Fatih  
NPP. 32.0021

Asdaf Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Email: [asyraf040403@gmail.com](mailto:asyraf040403@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The government began implementing the Digital Population Identity (IKD) policy nationally in 2022. However, the activation rate in South Aceh Regency, Aceh Province, remains far below the national target set by the Directorate General of Population and Civil Registration, with only 3.47% or about 5,983 of 172,564 eligible residents having activated their IKD. **Purpose:** This study aims to examine the optimization efforts of the Department of Population and Civil Registration of South Aceh Regency in activating Digital Population Identity, as well as identifying the inhibiting factors and the strategies used to overcome them. **Method:** This research uses a qualitative method and is analyzed using Hotnir Siringoringo's theory (2005). Primary data were obtained directly from informants, while secondary data came from articles, reports, and documents. Data analysis techniques include data collection, data reduction, and drawing conclusions. **Result:** The findings reveal that the activation of Digital Population Identity in South Aceh Regency has not been optimal. The main obstacles include limited public knowledge and awareness, minimal integration of digital IDs into daily life, and network accessibility issues. To address these challenges, the Department has implemented outreach services and intensified communication and public awareness campaigns. **Conclusion:** The optimization of Digital Population Identity activation in South Aceh Regency still faces several challenges. However, efforts such as mobile service programs and continuous socialization are strategic steps taken by the local government to increase public participation. Further use of technology and community collaboration is recommended to enhance the activation process.

**Keywords :** *Optimalization, Digital Population Identity*

**ABSTRAK**

**Latar Belakang Permasalahan (GAP):** Pemerintah mulai menerapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional pada tahun 2022. Namun, tingkat aktivasi di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, masih jauh di bawah target nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu hanya sebesar 3,47% atau sekitar 5.983 dari

172.564 penduduk wajib KTP. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis menggunakan teori Hotniar Siringoringo (2005). Data primer diperoleh langsung dari para informan, sedangkan data sekunder bersumber dari artikel, laporan, dan dokumen terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, belum maksimalnya integrasi IKD dalam kehidupan sehari-hari, serta kendala jaringan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinas melakukan layanan jemput bola serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Aceh Selatan masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, upaya seperti program layanan jemput bola dan sosialisasi yang berkelanjutan merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi dan kolaborasi lintas sektor disarankan untuk mendorong keberhasilan program ini.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Identitas Kependudukan Digital**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan zaman, inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini membahas berbagai aspek, termasuk keamanan informasi elektronik, perlindungan data pribadi, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk dalam sektor pelayanan publik.

Salah satu bidang pelayanan publik yang mengalami transformasi signifikan adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat turut meningkatkan kebutuhan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hutasoit (2017) yang menyatakan bahwa kebutuhan data dan informasi kependudukan semakin penting karena dinamika karakteristik penduduk yang terus berubah.

KTP merupakan dokumen identitas penting untuk mengakses berbagai layanan publik. Digitalisasi yang berkembang saat ini memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan proses penerbitan KTP melalui sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurut Gatingsih (2015), integrasi teknologi informasi dalam proses administrasi, termasuk pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk, berperan penting dalam menjaga validitas dan keandalan data kependudukan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ditandai oleh berbagai transformasi yang tercantum dalam Tabel 1.1. Sejak penerapan SIMDUK pada tahun 1995 hingga pengenalan IKD pada 2022, layanan administrasi kependudukan telah mengalami berbagai perubahan signifikan. Inovasi terkini, yaitu IKD, diatur melalui Permendagri No. 72 Tahun 2022 yang mengatur spesifikasi perangkat dan penyelenggaraan identitas kependudukan digital.

IKD merupakan bentuk digital dari identitas kependudukan yang menampilkan data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap warga negara wajib memiliki NIK sebagai identitas tunggal yang berlaku seumur hidup. Penerapan awal IKD dilakukan pada pertengahan tahun 2022 dengan menyoar ASN, kemudian diperluas ke kalangan mahasiswa dan masyarakat umum pada 2023, dengan target aktivasi sebesar 25% dari penduduk wajib KTP, dan meningkat menjadi 30% pada tahun 2024.

Tujuan utama IKD antara lain: menjaga keamanan data melalui sistem autentikasi, mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan pemanfaatan data digital, mempercepat transaksi layanan digital, serta menghemat anggaran negara. Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil, keberhasilan penerapan IKD dapat menghemat anggaran negara sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah per tahun karena penghapusan pengadaan blangko KTP. Selain efisiensi anggaran, manfaat lain dari IKD adalah kemudahan pelayanan, efektivitas verifikasi data, dan pengurangan ketergantungan pada vendor.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa, dengan 207.889.876 jiwa merupakan wajib KTP. Dari jumlah tersebut, 202.054.251 jiwa telah melakukan perekaman KTP (sekitar 97,19%). Target aktivasi IKD sebesar 30% berarti mencakup 62.366.962 jiwa. Namun, hingga 22 Februari 2024, aktivasi baru mencapai 8.186.961 jiwa atau sekitar 16,2% dari target tersebut, menunjukkan perlunya upaya lebih dari pemerintah di berbagai tingkatan.

Khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan data GIS Kemendagri Juni 2024, jumlah penduduk adalah 238.021 jiwa, terdiri dari 119.185 laki-laki dan 118.836 perempuan. Dari jumlah tersebut, penduduk wajib KTP sebanyak 172.342 jiwa, dengan target aktivasi IKD sebanyak 51.702 jiwa (30%). Namun, baru 5.600 jiwa yang telah melakukan aktivasi, atau sekitar 3,2% dari target. Angka ini masih jauh dari target nasional.

Hambatan dalam aktivasi IKD antara lain: keterbatasan infrastruktur teknologi, kendala akses informasi, tantangan administratif, serta kesenjangan literasi digital di masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K

abupaten Aceh Selatan saat ini berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh IKD. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut capaian dan upaya optimalisasi aktivasi IKD di wilayah ini.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul *“Optimalisasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh”*. Fokus permasalahan penelitian meliputi belum optimalnya pelaksanaan IKD, hambatan dalam pencapaiannya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat penggunaan IKD.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Beberapa permasalahan dalam studi ini terletak pada ketidakmampuan sejumlah penelitian sebelumnya untuk secara mendalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah rural seperti Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Agus Widiyarta (2023), lebih berfokus pada penerapan IKD di kota besar dengan analisis berbasis model kebijakan dan sosialisasi umum, sehingga kurang memperhatikan konteks lokal, tantangan geografis, serta karakteristik masyarakat setempat yang cenderung memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran yang berbeda. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang secara khusus mengidentifikasi hambatan, motivasi, serta solusi yang relevan secara kontekstual agar proses aktivasi IKD dapat lebih terfokus dan efektif di daerah rural.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga cenderung belum mengeksplorasi secara spesifik strategi-strategi inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD, terutama melalui pendekatan yang menyesuaikan karakteristik budaya dan infrastruktur lokal. Padahal, pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan kebijakan di tingkat daerah sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekurangan tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terkait faktor-faktor pendorong dan penghambat yang spesifik di Kabupaten Aceh Selatan, serta menyusun rekomendasi strategis agar target aktivasi IKD dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Agus Widiyarta (2023) bersifat deskriptif kualitatif dan berfokus pada implementasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Jepara, Kota Surabaya, dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses aktivasi telah dilakukan sesuai prosedur, tetapi masih diperlukan sosialisasi terus-menerus untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan, dan penggunaan model analisis yang berbeda—dari model Implementasi Kebijakan menjadi model Konsep Optimalisasi oleh Hotniar Siringoringo, yang berfokus pada tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya terbatas. Sementara itu, penelitian oleh Aulia dan Rahmadanik (2023) menyoroti pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya, dimana hasilnya menunjukkan bahwa petugas yang mampu memberikan informasi dan arahan secara jelas dapat menjadikan pelayanan KTP Digital cukup baik. Fokus penelitian ini lebih pada analisis sosial dan pengamatan langsung melalui wawancara, berbeda dengan fokus penelitian di Aceh Selatan yang menitikberatkan pada upaya Disdukcapil dalam mengoptimalkan aktivasi IKD dan mengatasi kendala yang ada.

Penelitian oleh Sasongko (2023) berjudul sama dan menggunakan pendekatan kualitatif, menilai kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam mengimplementasikan IKD dan menekankan pentingnya kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta strategi eksekusi yang efektif. Selanjutnya, penelitian oleh Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman (2023) menyoroti bahwa implementasi IKD di Kabupaten Banyumas belum mencapai target nasional, yang disebabkan oleh kendala seperti penggunaan smartphone, sosialisasi, dan jaringan. Fokus utama adalah pada pengamanan data pribadi dan masalah aktivasi yang masih rendah. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2022) mengenai penerapan Digital ID bagi ASN di Pemerintah Kota Tegal menekankan efisiensi proses pelayanan melalui sistem yang sederhana dan akurat, dan menggunakan teori fungsi manajemen dari George R. Terry. Perbedaan utamanya adalah lokasi yang berbeda, yaitu di Kota Tegal, dan penggunaan teori yang berbeda dari konsep optimalisasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Secara umum, meskipun tema yang diangkat terkait IKD tetap sama, perbedaan lokasi, pendekatan, serta fokus kajian menunjukkan bahwa studi yang akan dilakukan menyesuaikan konteks dan tujuan penelitian di Aceh Selatan dengan kebutuhan dan kondisi lokal yang berbeda.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan utama penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus lokasi dan pendekatan analisis yang digunakan. Sementara penelitian terdahulu seperti Agus Widiyarta (2023) dan Sasongko (2023) lebih berfokus pada proses implementasi dan kesiapan di kota besar seperti Surabaya dan Bandung dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan maupun

pendekatan deskriptif normatif, penelitian di Aceh Selatan akan menitikberatkan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian aktivasi IKD melalui pendekatan kontekstual dan model optimalisasi oleh Hotniar Siringoringo (2005). Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji solusi spesifik yang relevan dengan karakteristik masyarakat dan infrastruktur di daerah rural agar dapat meningkatkan efektivitas aktivasi IKD secara berkelanjutan, sehingga keberhasilannya tidak hanya dilihat dari proses, tetapi juga dari aspek kebermanfaatan jangka panjang dan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan IKD.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan dan mengidentifikasi strategi optimalisasi yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan tingkat aktivasi IKD. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan dan inovasi yang relevan dengan karakteristik masyarakat setempat agar proses aktivasi IKD dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mencapai target nasional sebesar 30% sesuai target Ditjen Dukcapil.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap secara mendalam dan menyeluruh fenomena terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Aceh Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek sosial, budaya, serta kebijakan yang mempengaruhi proses aktivasi IKD, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan holistik. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian target aktivasi IKD, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam pelaksanaan program.

Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, petugas lapangan, serta masyarakat setempat. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran subjektif dan objektif mengenai proses implementasi IKD, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat. Observasi lapangan dilakukan untuk memantau langsung proses aktivasi IKD, kegiatan sosialisasi, serta infrastruktur yang tersedia di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen relevan seperti regulasi pemerintah, laporan kegiatan, dan data statistik terkait tingkat aktivasi IKD di daerah tersebut.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif. Data dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi, penyajian data dalam bentuk naratif dan kutipan, serta penarikan kesimpulan yang berbasis pada interpretasi konteks sosial dan kebijakan lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperlihatkan hubungan sebab-akibat dan proses dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program IKD.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis bahwa rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat serta kegunaan IKD menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan, yang terletak di bagian barat Provinsi Aceh. Fokus penelitian berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 02° 23' 24" - 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" - 97° 56' 24" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil. Topografi Kabupaten Aceh Selatan beragam, mencakup dataran rendah, bukit, dan pegunungan, dengan luas 4.175,4 km<sup>2</sup>. Kecamatan Kluet Tengah memiliki luas terbesar, sedangkan Kecamatan Labuhan Haji memiliki yang terkecil. Penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 berjumlah 238.021 jiwa, terdiri dari 120.000 laki-laki dan 118.000 perempuan. Penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Kluet Utara dan Tapaktuan. Suku mayoritas di daerah ini adalah Aceh (60%), Aneuk Jamee (30%), dan Kluet (10%). Kabupaten Aceh Selatan terbentuk pada 4 November 1956 dan memiliki 18 kecamatan serta 260 gampong. Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan berupaya mencapai pembangunan yang adil dan sejahtera sesuai visi dan misi yang ditetapkan. Visi Kabupaten Aceh Selatan adalah "Membangun Aceh Selatan Maju & Produktif Demi Terwujudnya Aceh Selatan Yang Menandani, Adil dan Sejahtera," dengan fokus pada pemerataan kesejahteraan, pendidikan, dan ekonomi. Misi mencakup tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan pembangunan, peningkatan lapangan kerja, dan akses kesehatan yang lebih baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan visi "Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, dan Dinamis." Tugas dan fungsinya meliputi penyusunan kebijakan, pelaksanaan pelayanan administrasi, serta evaluasi pelaporan. Dinas ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, beberapa bidang fungsional, dan unit pelaksana teknis. Struktur organisasi mencakup jabatan seperti Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang dengan berbagai fungsi yang terkait dengan administrasi kependudukan. Pada Januari 2025, jumlah pegawai Dinas ini sebanyak 60 orang, terdiri dari PNS dan PTT. Pegawai PNS didominasi oleh lulusan S1, sedangkan PTT sebagian besar berpendidikan SLTA. Jabatan struktural di Dinas ini berjumlah tujuh, dengan beberapa jabatan fungsional khusus.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

#### **3.2.1 Optimalisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Aktivasi Identitas Kependudukan Digital**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran penting dalam administrasi kependudukan, termasuk dalam hal pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Aktivasi IKD di Kabupaten Aceh Selatan menjadi langkah strategis dalam mempercepat layanan administrasi kependudukan yang lebih efektif dan efisien. Melalui penggunaan IKD, penduduk tidak lagi perlu membawa dokumen fisik yang memakan waktu dan biaya, karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi digital yang terhubung dengan sistem yang ada di Disdukcapil.

Salah satu tantangan dalam pengaktifan IKD adalah infrastruktur teknologi yang masih terbatas. Meskipun Kabupaten Aceh Selatan sudah mulai mengimplementasikan sistem digitalisasi data kependudukan, daerah ini masih menghadapi beberapa masalah, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi, serta keterbatasan fasilitas internet di beberapa wilayah. Hal ini membuat proses aktivasi IKD tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan aktivasi IKD, Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan memerlukan strategi yang lebih komprehensif. Salah satunya adalah melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan IKD. Dalam hal ini, edukasi berbasis

komunitas menjadi sangat penting, di mana masyarakat diberikan pemahaman tentang cara mengakses dan memanfaatkan aplikasi kependudukan yang ada (Salsa Bella & Widodo, 2023). Pihak Disdukcapil juga perlu melakukan pelatihan kepada petugas di tingkat kecamatan dan desa, sehingga mereka dapat lebih siap untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai cara pendaftaran dan penggunaan IKD. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses verifikasi data menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi antrian pelayanan administrasi kependudukan. Dengan digitalisasi, Disdukcapil dapat memverifikasi data secara langsung, yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari. Proses digitalisasi ini, selain mempercepat administrasi, juga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pendataan yang sering terjadi pada sistem manual (Novita & Tristiana, 2022).

Namun, meskipun digitalisasi membawa kemajuan yang signifikan, tantangan berikutnya adalah terkait dengan masalah keamanan data. Penggunaan data pribadi dalam bentuk digital memerlukan perlindungan yang lebih ketat. Sistem keamanan yang efektif sangat penting untuk menjaga agar data penduduk tetap aman dan terhindar dari kebocoran yang bisa merugikan masyarakat. Dalam hal ini, Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan harus bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara, untuk memastikan sistem yang ada memiliki perlindungan yang cukup terhadap ancaman-ancaman yang mungkin timbul. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan tingkat sosialisasi yang lebih rendah terhadap inovasi digital mengalami kesenjangan dalam aktivasi dan penggunaan layanan administrasi kependudukan (Pangesti et al., 2024).

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga lain juga tak kalah signifikan. Terutama dalam hal peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan data kependudukan. Disdukcapil perlu memastikan bahwa petugas yang menangani pengelolaan data di lapangan memiliki keterampilan yang memadai dalam penggunaan sistem digital dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.

Keberhasilan implementasi IKD di Aceh Selatan juga tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tersebut. Tanpa partisipasi masyarakat dalam mendaftar dan mengaktifasi identitas kependudukan secara digital, tujuan dari program ini tidak akan tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi harus terus dilanjutkan, serta harus ada kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang kemudahan dan keamanannya.

Perbandingan temuan ini dengan studi sebelumnya mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya signifikan dalam menerapkan IKD di daerah lain dan beberapa tantangan yang serupa, spesifik di Aceh Selatan, tantangan dalam infrastruktur dan edukasi masyarakat merupakan faktor yang lebih dominan (Romlah et al., 2024). Berbeda dengan penelitian yang diadakan di daerah lain yang memiliki infrastruktur lebih baik, Aceh Selatan masih memerlukan penguatan dalam membangun infrastruktur sebelum meluncurkan program seperti IKD secara luas (Firdaus et al., 2023). Temuan ini memperkuat studi sebelumnya bahwa kesadaran masyarakat serta kesiapan teknologi sangat berpengaruh dalam keberhasilan program digitalisasi administrasi kependudukan.

### **3.2.2 Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Dalam Melaksanakan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan menghadapi sejumlah kendala dalam melaksanakan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah tersebut. Kendala ini berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kelancaran implementasi program

tersebut. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi dan pentingnya IKD. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami apa itu IKD, bagaimana cara penggunaannya, dan di mana serta untuk apa IKD diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung mengaktifkan IKD sebagai respons terhadap kebijakan yang diterapkan, tanpa memiliki pemahaman yang cukup mengenai manfaat dan fungsinya. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak ada manfaat yang signifikan setelah aktivasi, bahkan ada yang ingin menghapusnya kembali. Kurangnya pemahaman ini menjadi tantangan besar dalam menertibkan aktivasi IKD, karena masyarakat yang tidak merasa penting akan enggan untuk berpartisipasi lebih lanjut. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa masyarakat cenderung mengaktifkan teknologi baru sebagai respons terhadap kebijakan tanpa memahami sepenuhnya manfaat yang ditawarkan (Stewart et al., 2019). Ketidakpahaman ini menyebabkan mereka merasa tidak ada nilai tambah dari IKD, bahkan ingin menghapusnya setelah aktivasi.

Kesulitan dalam akses jaringan internet dan penggunaan gadget juga menjadi hambatan yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian besar masyarakat di daerah terpencil belum memiliki akses ke perangkat yang memadai untuk melakukan aktivasi IKD. Beberapa keluarga bahkan hanya memiliki satu gadget untuk seluruh anggota keluarga. Selain itu, akses internet yang tidak stabil di wilayah seperti Kecamatan Trumon, Trumon Timur, Kota Bahagia, Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Tengah, Kluet Selatan, dan Terbangun membuat proses aktivasi IKD menjadi sangat sulit. Ketidakstabilan jaringan ini menghambat penerapan program SIAK, karena tidak dapat menerbitkan barcode dengan lancar, yang merupakan bagian penting dari sistem digital tersebut. Kondisi ini memperburuk kesulitan masyarakat di daerah tersebut dalam mengakses layanan yang berbasis pada IKD.

Hambatan lainnya adalah pemanfaatan IKD yang masih belum maksimal. Meskipun IKD telah diperkenalkan sebagai solusi digital untuk mempermudah administrasi kependudukan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Salah satu alasan utama adalah masih digunakannya dokumen fisik dalam berbagai proses administrasi, seperti pendaftaran sekolah, pelayanan di bank, dan layanan kesehatan. Dokumen fisik masih menjadi syarat utama, sementara penggunaan IKD terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak perlu memiliki IKD karena fungsinya yang belum dirasakan secara luas dalam berbagai layanan administratif yang mereka jalani.

Selain itu, meskipun pemerintah pusat telah melakukan digitalisasi data kependudukan, banyak lembaga dan sektor terkait yang belum sepenuhnya mengadopsi penggunaan IKD dalam proses verifikasi data. Misalnya, sektor perbankan masih lebih bergantung pada KTP fisik untuk verifikasi identitas. Ketidakefektifan sistem ini membuat masyarakat merasa bahwa penggunaan IKD belum memiliki nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka enggan untuk mengaktifkan atau menggunakan IKD secara maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut telah mencakup berbagai langkah strategis. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi melalui penyuluhan yang lebih intensif dan peningkatan infrastruktur, terutama dalam hal akses internet dan ketersediaan gadget yang memadai. Selain itu, diperlukan juga kerja sama antara berbagai lembaga dan sektor terkait untuk mendorong adopsi lebih luas terhadap penggunaan IKD, guna memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan IKD dapat berfungsi secara maksimal dan mempermudah kehidupan administrasi masyarakat Aceh Selatan.

### **3.2.3 Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mencapai target pemerintah. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah program sosialisasi intensif yang dilaksanakan selama jam pelayanan di kantor Disdukcapil serta di luar jam dinas melalui program jemput bola. Program jemput bola dilakukan dengan mendatangi tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti warung kopi, sebagai lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama di daerah yang jauh dari kantor Disdukcapil. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi terkait IKD dan meningkatkan kesadaran mereka akan manfaatnya. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara lebih intensif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang kegunaan IKD, sehingga masyarakat lebih terbuka dan aktif dalam menggunakan IKD untuk berbagai keperluan administratif (Hudori et al., 2019).

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi intensif adalah kunci untuk meningkatkan adopsi teknologi digital dalam administrasi publik (Khariah, 2023). Program jemput bola ini juga mendukung hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang manfaat penggunaan teknologi (Khariah, 2023).

Disdukcapil juga berupaya membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga yang memanfaatkan data kependudukan, seperti sektor perbankan, untuk meningkatkan penggunaan IKD dalam verifikasi data. Meskipun pemerintah pusat telah mengembangkan sistem IKD secara sentral, tantangan masih ada karena lembaga-lembaga ini cenderung bergantung pada KTP fisik. Oleh karena itu, Disdukcapil berkomunikasi dengan bank-bank lokal, seperti Bank BSI dan Bank Aceh, untuk memastikan bahwa data kependudukan digital dapat diterima dan digunakan dalam proses verifikasi data. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan IKD sebagai sumber yang sah dan terpercaya dalam proses administrasi, yang pada gilirannya akan memotivasi masyarakat untuk mengaktifkan IKD dan memahami manfaatnya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan terhadap IKD dapat meningkat dan penggunaan teknologi ini dapat berjalan lebih efektif di Kabupaten Aceh Selatan.

Perbandingan temuan ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang, yang juga melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah dan perusahaan swasta, serta menciptakan desa digital untuk memperkenalkan penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan (Adinda & Pradana, 2025). Sama halnya dengan temuan tersebut, aktivasi IKD dapat didorong dengan melakukan pendekatan yang proaktif dalam menjangkau masyarakat, baik di institusi pendidikan maupun di lingkungan bisnis.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data, proses optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal, dengan pencapaian only 3,47% dari target 30% dan keberhasilan yang terbatas pada tertib administrasi kependudukan. Hambatan utama meliputi rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat IKD, kendala akses gadget dan jaringan di wilayah terpencil yang belum stabil, serta kurangnya pemanfaatan IKD secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang telah dilakukan meliputi program jemput bola dan sosialisasi jam pelayanan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, serta membangun

komunikasi dengan lembaga non vertikal seperti perbankan agar kepercayaan terhadap data IKD meningkat dan masyarakat lebih termotivasi melakukan aktivasi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, peneliti hanya mendapatkan hasil berdasarkan data dan wawancara belum berkesempatan terjun ke keseluruhan wilayah di Aceh Selatan, sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya mewakili kondisi di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Selatan. Pembatasan ini dipilih berdasarkan pendekatan studi kasus, agar mendapatkan data yang mendalam dan mendetail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivasi IKD di daerah tersebut.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat awal dan bersifat eksploratif, sehingga disarankan agar dilakukan studi lanjutan yang mencakup wilayah yang lebih luas dan berbagai tahapan pelaksanaan program IKD di Kabupaten Aceh Selatan. Pengkajian lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai keberhasilan serta hambatan yang dihadapi

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses penelitian berlangsung. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pengembangan layanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Aceh Selatan dan wilayah sekitarnya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widiyarta, I. H. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 43–51. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/6419>
- Ali, M.A. 2014. Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.com di Samarinda. *Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis*. <http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/?p=777>
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*.
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. 2023. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkt Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1008>
- Becker, G. S. 1993. *Human Capital A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. The University of Chigago Press. <https://academic.oup.com/ej/article-abstract/76/303/635/5250325>
- Cika Meisa Adinda, Galih Wahyu Pradana. (2025). Peran dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten jombang dalam program identitas kependudukan digital. *publika*, 12(4). <https://doi.org/10.26740/publika.v12n4.p1.039-1.052>
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49156&lokasi=lokal>
- Fajriyani, D., Fauzi. A., Kurniawati, Devi., Prakoso, Yudo., & Baihaqi, Fahri. 2023. Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jismab/article/view/135>
- Gatiningsih. 2015. Identifikasi Data Base Kependudukan sebagai Produk Pelaksanaan Sistem, Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Disdukcapil*. Volume 3. 107-126. <http://eprints.ipdn.ac.id/2404/>
- Gatiningsih, E. S. 2017. *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*
- Halik, A. (2016). The Implementation of Administrative Registration on Population Migration (Case of Surabaya City, East Java Province). *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 243-251. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.243-251>
- Hudori, Ahmad., Dahlan., Haslan, Muhammad Mabruur. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP DI Dusun Berembeng Barat Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/92>

Hutasoit, I. 2017. Pengantar Ilmu Kependudukan. Bandung: Alfabeta.

Hutasoit, I., & Pribadi, A. S. (2023). Pelayanan Dokumen Paket Kematian Melalui Program Sedudo Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Konstituen*, 5(2), 106–124. <https://doi.org/10.33701/jk.v5i2.3743>

Ida Bagus Mantra. 1988. *Population Mobility And The Links Between Migrants And The Family Back Home In Ngawis Village, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta Special Region*. <https://journal.ugm.ac.id/ijg/article/view/2180>

Indrayani, E., & Gatningsih. 2013. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya Pada Organisasi Pemerintahan. Jatinangor: IPDN Press. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1375/>

Khariah, Alpin. (2023). Perancangan strategis sistem informasi menggunakan metode wetherbe's pada disdukcapil kabupaten musi rawas. *intecoms journal of information technology and computer science*, 6(2), 1028-1036. <https://doi.org/10.31539/intecoms.v6i2.7782>

Madjid, Udaya. 2021. Manajemen Sumber Daya Aparatur Di Era Reformasi Birokrasi. <http://eprints.ipdn.ac.id/6101/>

Madjid, Udaya., Kawuryan, MW., Averus, A., Triyanto, T. 2024. Communication in Digital-Based Public Service in Regional Government of West Java Province. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/3778>

Mu'iz, & Icut. 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta :Bumi Aksara.

Muhammad, P., Zaini, M., Saputra, N., Lawang, K. A., & Susilo, A. 2023. Metodologi Penelitian Kualitatif. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>

Novita, H & Tristiana, E. 2022. Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Melalui Program Jemout Bola Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*. <https://journal.uns.ac.id/evokasi/article/view/253>

Pangesti, D. A., Nugraha, J. T., Sinuraya, S. I., & Akhni, G. N. (2024). Improving the user experience of ikd dukcapil pemalang: correlation of usability, perceived usefulness, perceived ease of use, and security. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(2), 74-88. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i2.1837>

Permadi & Rokhman. 2023. Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS : Journal of Policy and Administration Silampari* Vol.4 No.2. [https://www.researchgate.net/profile/Ali-Rokhman/publication/381404396\\_IMPLEMENTASI\\_IDENTITAS KEPENDUDUKAN](https://www.researchgate.net/profile/Ali-Rokhman/publication/381404396_IMPLEMENTASI_IDENTITAS KEPENDUDUKAN)

DIGITAL DALAM UPAYA PENGAMANAN DATA PRIBADI/links/666bba45de777205a32c3f5d/Implementasi-Identitas-Kependudukan-Digital-Dalam-Upaya-Pengamanan-Data-pribadi.pdf

- Putri, B., & Reviandani, O. 2023. Penerapan E-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital Di Kelurahan Dr. Soetomo Kota Surabaya. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/article/view/6829>
- Ramdani, M. A. 2022. Penerapan Inovasi Digital Id Bagi ASN Pemerintahan Kota Tegal Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/13142/>
- Romlah, S., Agustin, U. H., Azizah, W., & Siswanto, A. (2024). Implementasi aplikasi jember-sistem informasi pelayanan (j-sip) dalam menunjang keberhasilan layanan kependudukan. *Journal of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 158-163. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.233>
- Salsa, Bella & Widodo. 2023. Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Administrasi Publik*
- Sasongko, R. W. 2023. Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3148>
- Simangunsong, A. B. 2016. Interaksi Antar Manusia Melalui Media Sosial Facebook Mengenai Topik Keagamaan. *Jurnal Aspikom*. <https://core.ac.uk/download/pdf/195010532.pdf>
- Siringoringo, H. 2005. *Riset Operasional Seri Pemograman Linear*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. [https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=43](https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43)
- Thomas A. Stewart, Cong Liang, Justin Cotney et al. (2019). Evidence against tetrapod-wide digit identities and for a limited frame shift in bird wings. *nature communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11215-8>
- Yusuf, Muh., Ariefiati, A., Kautsar, M., & Darmawan, A. 2023. *E-Government*. Media Nusa Creative. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2E3OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Yusuf,+Muh.,+Ariefiati,+A.,+Kautsar,+M.,+%26+Darmawan,+A.+2023.+E-Government.+Media+Nusa+Creative.&ots=JOyFftIV93&sig=JXhT6OroP8LV7sKoBM4s64Bt20Q>